

TAJUK RENCANA

Pajak Hiburan yang Tidak Menghibur

INUL Daratista protes. Kali ini bukan lantaran eGoyang Ngebori, namun seruannya terkait masalah pajak. Dan Inul bertekat akan terus melantangkan suaranya. Ia bahkan sampai *sambat* kepada presiden. "Saya tidak akan berhenti bersuara, sampai jelas aturan pajak dibatalkan, Bukan hanya ditunda. Mohon Bapak Presiden Jokowi mendengar suara kami," ungkap Inul Daratista. (KR, 19/1).

Protes terhadap kenaikan pajak bukan hanya diserukan Inul Daratista. Ada juga suara santer pengacara kondang Hotman Paris yang mempersoalkan kenaikan pajak hiburan. Pemilik beberapa tempat hiburan di Bali ini merasa gusar dengan kenaikan pajak hiburan 40% dari *gross income* untuk pemerintah daerah (pemda). Dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip viva.co.id (19/1 : 09.28), Hotman menyebut ini sama saja pemda menjadi pemilik perusahaan. Bukan lagi sekadar pajak bahkan lebih kejam dari bagi hasil. Realita yang bisa membunuh bisnis hiburan.

Masalah kenaikan pajak hiburan yang sedang terus dilantangkan ini tidak lepas dari dampak diberlakukannya Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Khusus pajak hiburan juga sudah dibuat petunjuk teknisnya, mulai 1 Januari 2024 jenis yang terdampak adalah diskotek, karaoke, bar dan spa/mandi uap. Batas kenaikan sudah ditentukan antara 40% hingga 75%.

Kalangan pengusaha hiburan protes karena pajak ini ememeratkan bisnis mereka. Dan mereka khawatir hal ini justru akan memberatkan sektor pariwisata. Sekalipun Kementerian Keuangan menyanggah kekhawatiran tersebut bagi pariwisata. Konon tarif pajak yang dinaikkan hanya berlaku pada jenis hiburan emewahi dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Zaman sekarang, hiburan sudah merupakan sebuah kebutuhan primer. Di tengah pekerjaan dan kesibukannya, hiburan menjadi relaksasi atau

penyegar. Dan hiburan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyenangkan dan menyejukkan pikiran serta menghibur diri seseorang. Dengan kata lain, hiburan itu sangat penting termasuk untuk menjaga kesehatan mental seseorang. Tempat yang diharapkan bukan hanya membuat kita menjadi rileks dan senang. Namun juga dapat mengurangi beban pikiran, meredakan stres, bahkan menjadikan kehidupan seseorang lebih berwarna dan bahagia.

Tetapi di tengah situasi ekonomi yang belum pulih pasca-covid-19, pajak hiburan dinaikkan. Ketika ada tambahan beban biaya yang tidak sedikit, tentu masyarakat juga akan berfikir untuk mendatangi tempat-tempat hiburan. Meski Kementerian Keuangan menyebut yang terkena dampak hanya kalangan tertentu karena yang terkena adalah hiburan emewahi, yakinkah bila ini tidak akan memberi pengaruh?

Reaksi daerah memang berbeda-beda. Meski amanat undang-undang ini merupakan peluang mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, namun menurut Pj Walikota Yogya Singgih Raharjo juga harus dipikirkan secara matang. Terutama daya beli masyarakat serta dampaknya di sektor pariwisata secara umum. Mengingat beban pajak tersebut akan disangga konsumen.

Sebagai kota pariwisata, Kota Yogya memang tidak bertabur hiburan malam. Maka Pemkot Yogya menerapkan batas kenaikan yang terendah, 40%. Sebelumnya pajak hiburan dan karaoke diterapkan 30% dan pajak usaha spa 20%. Kedua wajib pajak tersebut per 1 Januari sudah dipungut pajak 40% di Kota Yogya. Tetapi bagaimana Sleman dan Bantul di DIY?

Amanat undang-undang harus dilaksanakan. Walau pemungut pajak hiburan adalah pemda, namun jangan lupa undang-undang ini ditetapkan DPR RI. Jadi mungkin kita perlu bertanya pada wakil rakyat yang terhormat di Senayan sana. □-f

IPO, Kebugaran Jasmani dan Indonesia Emas

DALAM Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJPN) 2025-2045 telah ditetapkan visi Indonesia Emas 2045, menjadi negara maju. Salah satu sasaran dalam mencapai visi besar tersebut adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia (SDM). Faktor SDM yang unggul dan berkualitas ini akan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan status Indonesia Emas tersebut.

Pada rentang 2025-2045 disebutkan, Indonesia mengalami bonus demografi. Penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 324,05 juta jiwa dengan mayoritas penduduk berusia produktif. Karena itu SDM yang melimpah harus disiapkan menjadi SDM yang bugar agar berkualitas unggul sehingga berdaya saing tinggi.

Tantangan Besar
Namun, jalan menuju visi tersebut dihadapkan pada tantangan besar terkait SDM yaitu rendahnya tingkat kebugaran jasmani. SDM Indonesia saat ini belum semuanya memiliki kebugaran jasmani yang baik. Hasil laporan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) 2023, menunjukkan bahwa 77,12% anak usia 10-15 tahun dan 83,55% remaja usia 16-30 tahun tergolong kurang bugar (Toho Cholikh Mutohir, dkk, 2023). Masalah ini menjadi krusial karena untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak mungkin tercapai apabila SDM tidak bugar.

Bugar dimaknai sebagai kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi. Dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang. Serta siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga (p2ptm.kemkes.go.id).

Karena itu, upaya peningkatan kebugaran jasmani masyarakat Indonesia harus menjadi perhatian penting. Data IPO 2023 memberikan gambaran nyata tentang perlunya intervensi. Dengan

Agung Widodo

melibatkan pemangku kebijakan dan akademisi, diharapkan dapat mengemban program literasi fisik yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan program kesehatan masyarakat. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kebugaran dapat memotivasi mereka untuk mengadopsi gaya hidup lebih aktif.

Literasi fisik adalah motivasi, kepercayaan diri, kompetensi fisik, pengetahuan dan pemahaman untuk meng-



KR-JOKO SANTOSO

harga dan menerima tanggung jawab guna terlibat dalam aktivitas fisik sepanjang hayat (Whitehead, 2013). Literasi fisik yang baik tidak hanya mencakup pengetahuan tentang olahraga, tetapi juga kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kebugaran bagi kualitas dan produktivitas hidup.

Langkah berikutnya adalah memotivasi partisipasi aktif dalam aktivitas olahraga. Pemangku kebijakan dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk menciptakan program-program yang menarik dan terjangkau bagi masyarakat. Mendorong partisipasi berolahraga

juga perlu didukung kampanye kesadaran masyarakat. Media sosial dan media massa dapat menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan pesan tentang pentingnya kebugaran jasmani.

Program-program olahraga masyarakat yang dikemas dalam bentuk hiburan atau *sportainment*. Yang dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat kebugaran dan merangsang minat mereka untuk berpartisipasi.

PJOK

Solusi lain yang dapat diterapkan adalah memperkuat keterlibatan sekolah dalam menggalakkan kegiatan olahraga. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) tidak hanya sekadar mata pelajaran, tetapi juga sarana untuk menanamkan nilai-nilai budaya hidup sehat sepanjang hayat.

Kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya kebugaran jasmani tidak hanya berguna bagi kesehatan pribadi, tetapi juga sebagai investasi dalam menciptakan SDM yang unggul bagi masa depan Indonesia. Dengan bersama-sama bekerja menuju masyarakat yang lebih bugar, kita dapat meraih visi Indonesia Emas 2045 dengan keunggulan sumber daya manusia yang berdaya tahan, produktif, dan siap menghadapi tantangan global. Semangat untuk berubah dimulai dari kesadaran dan tindakan kita sehari-hari. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang sehat dan tangguh! □-f

***) Agung Widodo SPd Mor, Dosen Ilmu Keolahragaan S1 FKM UNIMUS, Mahasiswa S3 Ilmu Keolahragaan FIKK UNY, Kabid Litbang KONI Klaten**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Banyak Pohon Tumbang, Perlu Perhatian RT/RW

HUJAN deras disertai angin membuat banyak pohon tumbang di pelbagai daerah. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bukan hanya pemilik pohon-pohon yang besar, namun juga lingkungan. Mungkin alangkah baiknya jika kemudian RT/RW juga mengadakan pengawasan lingkungan dan pendekatan dengan pemilik pohon tersebut.

Mungkin saja, pengurus bisa melakukan pendekatan dan memberi informasi mengenai bahaya tanaman yang ada di halaman rumah seorang warga.

Baik jika tumbang ataupun *sempal*. Kemudian bisa menawarkan solusi, misal dengan menyediakan orang yang bersedia memotong atau yang lain.

Bukan menambah pekerjaan RT/RW. Namun ini menjaga lingkungan bersama. Karena khawatir aja pohon tumbang bukan hanya mengenai rumah pemilik. Namun juga rumah tetangga. Atau malah menimpa pengguna jalan. Jadi perlu perhatian bersama. □-f

***) Muryani, Timoho Yogyakarta**

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSC. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS. **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan **Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta. **Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan:** H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto. **Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).